



## PROSIDING

# Konferensi Nasional Komunikasi

## Komunikasi Organisasi Pengelolaan APBD

(Kebijakan Tata Kelola APBD Berbasis E-Government Plus Pada Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah)

Rachmi Kurnia Siregar<sup>1\*</sup>, Wenny Maya Arlena<sup>2</sup>,

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

[rachmi.kurnia@budiluhur.ac.id](mailto:rachmi.kurnia@budiluhur.ac.id), [wenny.maya@budiluhur.ac.id](mailto:wenny.maya@budiluhur.ac.id)

### Abstract

Regent of Batang, Central Java, Yoyok Riyo Sudibyo (2012-2017) creates transparency in the governance of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) as part of its governance transformation. Among other things, implementing e-Government Plus policy, in addition to electronic-based public services is also strengthened by providing Information Management and Documentation Officers (PPIDs), establishing Public Service Quality Improvement Unit (UPKP2) and holding Budget Festival (FA). This research uses qualitative method and case study aims to: 1) Analyze the communication policy process of e-government plus 2) Analyze the decision making process of e-government plus communication policy. The results of research: Batang regency is advised to continue the Budget Festival as the identity of the region adapted to the current condition according to the development of technology, information and communication (ICT) based on e-government plus.

Keywords: Organizational Communication, APBD Management, E-Government Plus

### Abstrak

Bupati Batang, Jawa Tengah, Yoyok Riyo Sudibyo (2012-2017) menciptakan transparansi tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bagian dalam transformasi pemerintahannya. Di antaranya menerapkan kebijakan e-Government Plus. Selain pelayanan publik berbasis elektronik juga diperkuat dengan menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) dan mengadakan Festival Anggaran (FA). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus bertujuan: 1) Menganalisis proses kebijakan komunikasi e-government plus 2) Menganalisis proses pengambilan keputusan kebijakan komunikasi e-government plus. Hasil penelitian: Pemkab Batang disarankan melanjutkan Festival Anggaran sebagai identitas kawasan disesuaikan dengan kondisi terkini sesuai perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) berbasis e-government plus.

Kata kunci: Komunikasi Organisasi, Tata Kelola APBD, E-Government Plus.

**Copyright © 2017 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. All rights reserved**

### Pendahuluan

Penerapan kebijakan otonomi daerah (Otda) yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah salah satunya berdampak buruk dengan menjamurnya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ini terlihat seiring melesatnya nilai Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), korupsi yang melibatkan eksekutif, legislatif dan yudikatif juga tumbuh subur. Selama 2010-2014, aparat menyidik 2.492 kasus korupsi.

Mengantisipasi KKN di jajarannya, Bupati Batang, Jawa Tengah (2012-2017) Yoyok

Riyo Sudibyo berupaya membangun kepercayaan publik, salah satunya dengan mengadakan Festival Anggaran-untuk selanjutnya disingkat FA. Ini dilakukan karena mantan bupati sebelumnya terjerat kasus korupsi APBD.

Semula FA dilakukan dengan membagikan brosur, pamflet dan rapat akbar tapi hal ini dinilai tidak efektif. Mulai 2014, FA diselenggarakan secara indoor di samping rumah dinas Bupati Batang yang menampilkan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (POD) hingga desa dalam bentuk *booth*.

Kiprah Bupati Batang ini meraih penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award 2015 bersama Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Pemkab Batang yang mengklaim sebagai pelopor FA di Indonesia kini menjadi pusat pembelajaran terkait pelayanan publik berbasis elektronik (*e-government*) bagi pemerintahan lainnya mulai tingkat kabupaten, kota hingga provinsi. Pemkab Karang Anyar mengadopsi Festival Anggaran Batang 2016 namun memamerkan anggaran tahun berjalan.

Upaya Yoyok menggelar FA bertujuan memenuhi UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui UU tersebut, diharapkan dapat mendorong transparansi dalam pengelolaan negara serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Bahkan dengan penerapan UU ini, setiap badan publik harus mempersiapkan diri secara optimal, karena informasi yang bersifat rahasia sekalipun dapat dibuka oleh Komisi Informasi untuk umum dalam merespon permohonan pemohon informasi publik.

Situs Blitar.go.id mengemukakan keterbukaan informasi publik berupaya memberi pemahaman kepada masyarakat terkait rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan komunikasi dan pembuatan keputusan kebijakan komunikasi melalui informasi *e-government plus*.

Dalam aspek praktis, penelitian diharapkan bermanfaat menetapkan strategi

kebijakan komunikasi melalui informasi *e-government* oleh pemerintah pusat maupun daerah terkait pengelolaan keuangan anggaran untuk membangun tata pemerintahan yang bebas KKN.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Komunikasi Organisasi

Komunikasi merupakan kegiatan sehari-hari yang terhubung dengan semua aktivitas dan menjadi pusat kehidupan manusia, melalui proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi sebagai dasar kehidupan. Setiap aspek kehidupan manusia dipengaruhi cara berkomunikasi dengan orang lain. Hovland dalam Effendy (2005:10) mengungkapkan komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Selain menyampaikan informasi, komunikasi juga bertujuan mendidik dan memengaruhi orang lain.

Proses komunikasi melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain.

Organisasi merupakan suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Rogers, M Everest (Afdjani, 2014:118) menyebutkan organisasi sebagai suatu sistem dari individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Organisasi dibentuk melalui komunikasi saat individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan individu dan tujuan bersama.

Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terfokus pada individu yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. Ilmu komunikasi menyoroti bentuk komunikasi yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik yang digunakan, media yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor penghambat dan sebagainya.

Arti penjelasan di atas, diperlukan kemampuan komunikasi dari setiap individu dalam suatu hubungan, kelompok, masyarakat maupun organisasi untuk menyampaikan pesan

baik secara langsung maupun melalui media dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain komunikasi dalam suatu organisasi merupakan hal mutlak dalam mewujudkan tujuan organisasi, selain berbagai aspek lainnya.

## 2. Fungsi Komunikasi dalam Organisasi

Dalam sebuah organisasi, komunikasi diibaratkan sebagai darah dalam tubuh (Ruben,2014:vii). Conrad (dalam Tubbs dan Moss,2005) mengidentifikasi tiga fungsi komunikasi organisasi yaitu: 1) Fungsi perintah berkenaan dengan anggota-anggota organisasi mempunyai hak dan kewajiban membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah. Tujuan dari fungsi perintah adalah koordinasi antara sejumlah anggota yang bergantung dalam organisasi tersebut; 2) Fungsi relasional terkait dengan komunikasi memperbolehkan anggota-anggota menciptakan dan mempertahankan hubungan personal dengan anggota organisasi lain; 3) Fungsi manajemen ambigu terkait pilihan dalam situasi organisasi kerap dibuat dalam keadaan yang sangat ambigu. Komunikasi adalah alat untuk mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan yang melekat dalam organisasi.

Dikaitkan dengan fungsi komunikasi dalam organisasi, peneliti membatasi untuk mengkaji fungsi perintah yakni pada prinsipnya individu dalam organisasi memiliki hak dan kewajiban untuk membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak atas suatu perintah.

## 3. Struktur Organisasi

Dalam mencapai tujuan bersama, suatu organisasi membuat pengelompokan kegiatan dan pembagian/ pengaturan tugas untuk masing-masing individu maupun unit-unit yang ada dengan menyusun struktur organisasi. Peranan pimpinan sangat

Schermerhorn (1996) mendefinisikan struktur organisasi adalah sistem tugas, alur kerja, hubungan pelaporan dan saluran komunikasi dalam kelompok yang dilakukan bersama-sama.

(<http://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-contoh-bentuk-struktur-organisasi/>)

Struktur organisasi sebagai aktifitas komunikasi dan ditentukan oleh perilaku yang saling berhubungan (Pace & Faules,2000). Adanya pola interaksi dalam suatu organisasi juga diperkuat oleh Robbins (2003) di mana struktur organisasi mengatur dan mengelompokkan pembagian tugas yang dikoordinasikan secara formal. Ia mengelompokkan 6 unsur dalam merancang struktur organisasi sebagai berikut: 1) Spesialisasi pekerjaan, pada tingkat apa tugas dibagikan dalam pemisahan pekerjaan; 2) Departementalisasi, di mana pengelompokan pekerjaan dilakukan atas dasar tugas yang sama atau mirip sehingga pekerjaan tersebut dapat dikoordinasikan; 3) Rantai komando, untuk siapa laporan yang dibuat individu dan kelompok; 4) Rentang kendali, berapa banyak individu yang dapat diatur; 5) Sentralisasi dan desentralisasi, di mana letak wewenang pengambilan keputusan; 6) Formalisasi, pada tingkat apa suatu aturan dan kemudahannya akan mengatur pekerjaan dari manager.

## 4. Teori Informasi Organisasi

Komunikasi organisasi pada Pemkab Batang dapat dikaji saat Bupati Batang berinteraksi dengan jajarannya. Dalam organisasi erat kaitannya dengan interaksi antara individu satu sama lain melalui aktivitas komunikasi. Teori Informasi Organisasi di bawah naungan pemikiran Sibernetika, digagas Karl Weick dalam Little John (2011:364) memandang susunan sebagai sesuatu yang muncul dari pola-pola interaksi dalam organisasi. Teori ini menempatkan komunikasi di bagian depan sebagai proses kunci yang digunakan untuk memperoleh susunan organisasi dan menekankan tentang proses berorganisasi. Weick menekankan pentingnya berorganisasi dalam bidang komunikasi, karena komunikasi merupakan dasar pengorganisasian manusia dan dasar pemikiran dalam memahami manusia berorganisasi. Lebih dari itu kegiatan berorganisasi berfungsi mengurangi ketidakpastian informasi.

Menurut Weick, organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peranan, tapi oleh aktivitas komunikasi. Organisasi pada dasarnya merupakan sesuatu yang dicapai manusia melalui sebuah proses komunikasi berkelanjutan. Saat manusia berinteraksi pada dasarnya menciptakan organisasi. Semua perilaku dihubungkan karena seseorang bergantung pada perilaku orang lain.

Teori ini mengkombinasikan siklus perilaku komunikasi dan aturan bersama sebagai strategi organisasi untuk meminimalisir ketidakpastian informasi. Dalam siklus perilaku komunikasi meliputi 4 tahap yakni Pertama, Aksi/tindakan yang merupakan suatu pernyataan atau perilaku seorang individu. Suatu aksi mengacu pada pernyataan komunikasi dan perilaku yang menunjukkan ketidakpastian seseorang. Kedua, Interaksi/repons yaitu reaksi terhadap aksi. Suatu respon bertujuan mengklarifikasi terhadap informasi yang tidak pasti dan dikemukakan sebagai hasil dari aksi yang dilakukan sebelumnya. Ketiga, Penyesuaian yaitu tanggapan terhadap respon yang merupakan penyesuaian terhadap aksi yang diterima sebelumnya. Keempat, Interaksi ganda yaitu siklus dari aksi, respon dan penyesuaian dalam berbagai pertukaran informasi. Interaksi ganda mengacu pada sejumlah siklus perilaku komunikasi yang digunakan untuk membantu anggota organisasi dalam mengurangi ketidakpastian informasi. Contoh interaksi ganda misalnya rapat rutin, konferensi, menelepon, saling mengirim memo, diskusi, interview dan sebagainya.

### 5. Kebijakan Tata Kelola APBD

Kebijakan komunikasi merupakan peraturan yang bersifat praktis. Sebagai konsekuensinya, formulasi kebijakan komunikasi selanjutnya menjadi peraturan yang aplikatif. Kebijakan komunikasi menurut Topatimasang (2000:41) sebagai satu sistem hukum yang memiliki tiga aspek yakni 1) isi hukum yang terkandung dalam kebijakan komunikasi misalnya Undang-Undang, Surat Keputusan dan Peraturan Daerah, 2) struktur hukum yang bermuara pada

komitmen pelaksana kebijakan komunikasi terhadap implementasi kebijakan tersebut, 3) budaya hukum yang mencermati reaksi masyarakat terhadap isi dan implementasi kebijakan komunikasi.

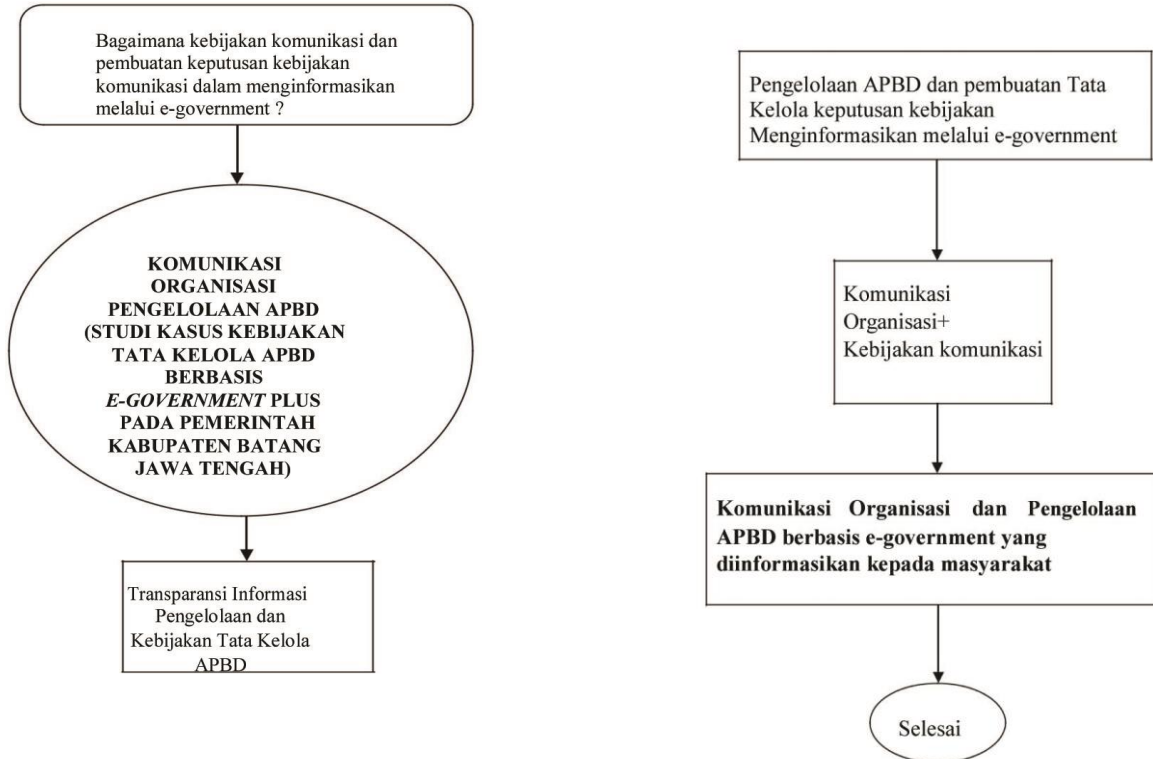
### 6. E-Government

*E-Government* merupakan bentuk komunikasi organisasi secara elektronik oleh pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Pemerintah yang menggunakan digital, sebagai bentuk pola dalam komunikasi organisasi atau pemerintah yang bertransformasi. *E-Government* adalah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan penyalenggaraan pemerintahan yang berbasis pada teknologi elektronik yang informatif, dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga pelayanan bagi warganya, informasi hasil kegiatan disetiap lembaga atau institusi serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan dapat terinformasikan dengan jelas dan transparansi. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang bersifat demokratis. (sumber : Wenny Maya).

### Metode Penelitian

#### 1. Kerangka Pemikiran

Peneliti tertarik meneliti kebijakan komunikasi pengelolaan pemerintahan dan tata kelola APBD berbasis *e-government plus* melalui rangkaian komunikasi organisasi yang digagas Bupati Batang periode 2012-2017 Yoyok Riyo Sudibyo. Sebagai referensi, peneliti mencari berbagai studi literatur penelitian sebelumnya terkait komunikasi organisasi dan kebijakan komunikasi oleh institusi pemerintahan.

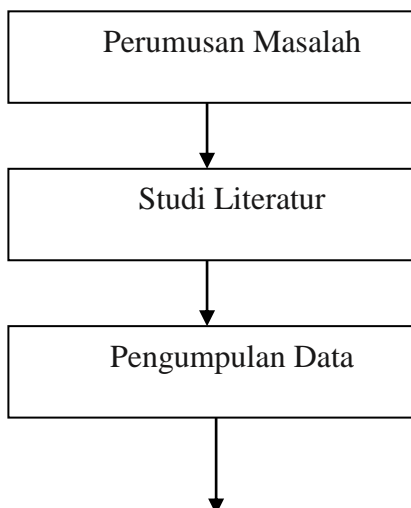


Gambar 2. Alur Pemikiran Penulis

Peneliti menganalisis komunikasi organisasi dalam transparansi pengelolaan informasi berbasis *e-government plus* yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan APBD di Pemkab Batang sebagai bagian upaya pemberantasan korupsi.

**2. Alur Pikir Penelitian**

Tahap selanjutnya menganalisis kebijakan komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi dan pembuatan keputusan kebijakan komunikasi *e-government plus* di Pemkab Batang mengenai pengelolaan APBD.



**3. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif yakni untuk menggambarkan suatu variabel, keadaan, fenomena atau gejala sosial tertentu. Pemilihan tempat dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* yaitu Pemkab Batang, Jawa Tengah yang mengimplementasikan komunikasi organisasi dan kebijakan pengelolaan APBD yang diinformasikan kepada masyarakat melalui *e-government*. **Tempat penelitian** adalah di Pemkab Batang, Jawa Tengah. Peneliti mengamati pengelolaan kebijakan APBD dan komunikasi organisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui *e-government*. **Teknik pengumpulan data** dikaitkan dengan permasalahan penelitian yakni Bagaimana komunikasi organisasi dalam Pengelolaan APBD yang diinformasikan kepada masyarakat melalui *e-government plus*.

Peneliti mewawancarai Bupati dan jajaran Pemkab Batang terkait pelaksanaan FA sebagai bagian dari *e-government plus*. Serta kalangan DPRD, LSM anti korupsi, tokoh adat, tokoh

masyarakat dan pengunjung di FA. Penelitian ini dilakukan mulai Januari hingga Desember 2017. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi. **Analisis Data** dilakukan dengan analisis interpretif dan triangulasi data dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap subjek penelitian yang telah ditentukan. Analisis interpretif digunakan untuk menetapkan strategi kebijakan komunikasi organisasi dan pengelolaan APBD Pemkab Batang Jawa Tengah melalui *e-government plus*.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah menganalisis kebijakan komunikasi dan pengambilan keputusan kebijakan komunikasi pada APBD Pemkab Batang melalui *e-government plus*.



Gambar 3. Alun-alun Kabupaten Batang

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 52, tanggal 14 Juni 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965, tanggal 14 Juli 1965.

Kabupaten Batang, terutama Ibu Kota Pemerintahannya berada pada jalur ekonomi pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura ini mendukung percepatan Kabupaten Batang berkembang prospektif di sektor jasa transit dan transportasi. ([www.batangkab.go.id](http://www.batangkab.go.id))

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Kombinasi ini

menjadi sumber potensi bagi Kabupaten Batang untuk mengembangkan pembangunan kawasan di sektor agroindustri, agrowisata dan agrobisnis.

### 1. Visi dan Misi Pemkab Batang

**Visi** : Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram, dan Sejahtera pada Tahun 2022.

**Misi antara lain:** 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis eGovernment didukung pengembangan kerjasama. 2) Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.

Prioritas agenda kegiatan yakni peningkatan perekonomian daerah, peningkatan potensi pariwisata daerah serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### 2. Daftar Bupati

Sejak Kabupaten Batang berdiri pada 1966, wilayah ini memiliki 10 bupati hingga sekarang yakni: 1) [R. Sadi Poerwopranoto](#), 8 April 1966 s/d 31 Mei 1967 2) [R. Harjono Prodjodirdjo](#), 31 Mei 1967 s/d 10 Oktober 1972 3) [Soejitno](#), 10 November 1972 s/d 21 Maret 1979 4) [Soekirdjo](#), 21 Maret 1979 s/d 1 Januari 1988 5) [Soehoed](#), 26 Juli 1988 s/d 26 Juli 1993 6) [Moeslich Effendi, SH](#), 26 Juli 1993 - 26 Juli 1998 7) [Djoko Poernomo, SH, MM](#), 22 Oktober 1998 - 7 Agustus 2001 8) [Bambang Bintoro, SE](#), 11 Februari 2002 – 2011 9) Yoyok Riyo Sudibyo, Januari 2012-2017 menyelenggarakan Festival Anggaran Batang 2014 dan 2016 10) Wihaji, Mei 2017-2022.

### 3. Struktur Organisasi

Pembentukan dan susunan perangkat daerah Pemkab Batang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No 8 tahun 2016 sebagai berikut:

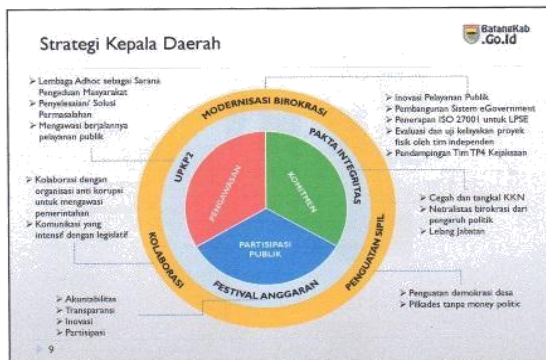


Gambar 4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang

#### 4. Profil Kebijakan APBD Pemkab Batang

Sebagai Bupati Batang periode 2012-2017, Yoyok membangun modernisasi birokrasi, penguatan sipil dan kolaborasi yang berlandaskan komitmen, didukung pengawasan dan partisipasi publik. Antara lain inovasi pelayanan publik, pembangunan sistem eGovernment, penerapan ISO 27001 untuk LPSE, evaluasi dan uji kelayakan proyek fisik oleh tim independen serta pendampingan Tim TP4 Kejaksaaan. Penguatan sipil dilakukan dengan penguatan demokrasi desa dan Pilkades tanpa money politik.

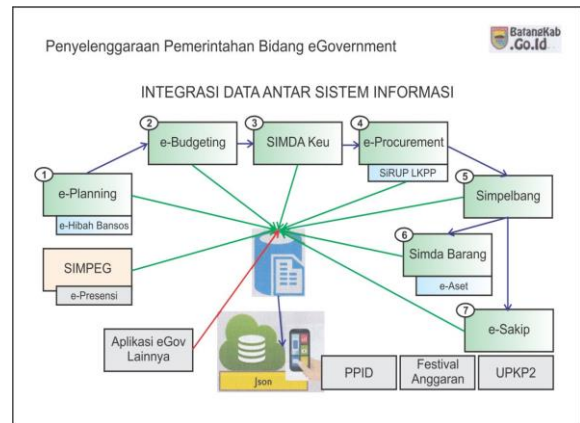
Ia mewajibkan seluruh PNS untuk membuat pakta integritas yang bertujuan mencegah dan menangkal KKN, memperkuat netralitas birokrasi dari pengaruh politik dan mengadakan lelang jabatan. Menggelar Festival Anggaran pada 2014 dan 2016. Berikut strategi Kepala Daerah yang diusung Yoyok Riyo Sudibyo selaku Bupati Batang (2012-2017):



Gambar 5. Strategi Kepala Daerah di era Yoyok Riyo Sudibyo

Menjawab tuntutan jaman serta seiring pesatnya perkembangan tekonologi dan informasi

(IT), Yoyok menjalankan pemerintahan berbasis IT melalui pembangunan sistem *e-government plus* mencakup pelayanan publik berbasis elektronik (e-gov) diperkuat dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Festival Anggaran dan membentuk Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2). Berikut gambar penyelenggaraan pemerintahan di era Yoyok Riyo Sudibyo di bidang *E-Government Plus*:



Gambar 6. Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang eGovernment Plus di era Yoyok

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, pelaksanaannya berfokus pada komunikasi organisasi melalui kebijakan komunikasi dan pembuatan keputusan kebijakan komunikasi *e-government plus*, serta mengkaji kendala yang dihadapi Pemkab Batang dalam menerapkan kebijakan komunikasi pada FA.

Penelitian awal dilakukan saat FA 2016 dan memperoleh data-data dari sejumlah nara sumber yang berkompeten. Meliputi Bupati Batang (2012-2017) Yoyok Riyo Sudibyo, Kepala Bagian Orda, Retno Dwi Irianto, serta wawancara dengan Bupati Tegal Ki Entus Sumarsono, dan pengunjung yang datang di festival tersebut.

Tahapan selanjutnya pada Mei dan Agustus 2017 peneliti bermaksud mengkaji FA 2017 dengan mewawancarai Bupati Batang periode 2017-2022 Wihaji, Wakil Bupati Batang (2017-2022), Suyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nasikhin, Ketua DPRD Kabupaten Batang, Teguh Raharjo, Ketua UPKP2

Batang, Abdul Wahid, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Asri Hermawan dan Komifo Pemkab Batang.

Untuk kelengkapan data, peneliti menggunakan beberapa dokumen dari Pemkab Batang, studi pustaka dan sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian merupakan gambaran umum yang diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian.

## Pembahasan

### 1. Proses Komunikasi dalam Organisasi

Komunikasi adalah sebuah proses, suatu kegiatan yang memiliki banyak kegiatan yang memiliki banyak langkah terpisah tetapi saling berhubungan sepanjang waktu (Ruben,2014:16). Organisasi sebagai sistem terbuka dan dinamis ditandai oleh masing-masing anggota yang saling menciptakan dan menukar pesan. Penciptaan dan pertukaran pesan itu berlangsung terus menerus (Romli,2011:13).

Untuk mengetahui komunikasi dalam organisasi terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah pada FA di Pemkab Batang, peneliti sebelumnya melakukan wawancara dengan Yoyok Riyo Sudibyo selaku Bupati Batang periode 2012-2017 yang menggelar FA pada 2014 dan 2016. Diperlukan kemampuan komunikasi dari setiap individu dalam suatu hubungan, kelompok, masyarakat maupun organisasi untuk menyampaikan pesan baik secara langsung maupun melalui media dengan tujuan tertentu.

Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan hal mutlak dalam mewujudkan tujuan organisasi, selain berbagai aspek lainnya melalui serangkaian proses. Keseluruhan yang ada di dunia merupakan hasil suatu proses. Mead dalam Subiakto (2014:10) menyebutkan kehidupan sosial dapat dipahami sebagai suatu proses dan setiap kejadian selalu mengandung waktu lampau, sekarang dan yang akan datang.

Komunikasi organisasi oleh Goldhaber (1993) seperti telah dijelaskan pada Tinjauan Pustaka, pelaksanaan Festival Anggaran 2014 dan

2016 yang digagas Bupati Batang periode 2012-2017 Yoyok Riyo Sudibyo, proses komunikasi yang berlangsung merupakan ide dasar/gagasan dan inovasi Yoyok selaku pimpinan untuk membuka akses kepada publik terkait transparansi pengelolaan APBD. Dalam proses komunikasi tersebut, pada dasarnya merupakan mekanisme untuk melaksanakan kekuasaan dan memperoleh tanggapan (Shacter,1960) dalam Subiakto dan Ida (2014:15).

Hal ini seperti diungkapkan pejabat di jajaran Pemkab Batang saat diwawancara peneliti yakni:

“Proses komunikasi berlangsung lancar-lancar saja. Saat itu pak bupati dalam rapat menyampaikan idenya untuk buka-bukaan tentang penggunaan APBD kepada rakyat selaku pemegang mandat. Hal ini sesuai sumpah beliau saat dilantik pada Februari 2012 yang bertujuan melaporkan langsung hasil kerja terutama pengelolaan anggaran kepada rakyat secara langsung dan terbuka. Hasil rapat, kami diskusikan dengan tim terkait dalam panitia,” kata Retno Dwi Irianto, Kabag Organisasi Setda Batang.

“Proses komunikasi tentang transparansi anggaran melalui festival anggaran di Kabupaten Batang merupakan terobosan karena belum pernah ada pemerintah daerah sebelumnya yang melakukan hal tersebut. Kami tentu saja mendukung ide dan gagasan tersebut penting untuk semakin mewujudkan *good government* dan mendukung pemberantasan KKN,” kata Agus Wimoyo, Kepala Bidang Statistik Pengendalian Evaluasi (Stadalev) Bapeda Pemkab Batang.

Dari dua wawancara di atas, menggambarkan proses komunikasi yang dilakukan Bupati Yoyok menyangkut FA berjalan dalam koridor atasan ke bawahan, serta bawahan ke sesama rekan kerja untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Gagasan Bupati Batang periode 2012-2017 Yoyok Riyo Sudibyo dengan mengadakan FA Batang yang dimulai sejak 2013 dan secara formal dilakukan pada 2014 dan 2016, dilakukan secara kolektif dalam organisasi yang berisi informasi publik untuk diketahui masyarakat luas.

Informasi publik adalah pesan yang terlembagakan, terbuka dan bersifat umum sehingga dapat diterima dan dicerna oleh publik yang disebut khalayak (Arifin,2014:v).

## 2. Analisis Kebijakan Komunikasi dan Pengelolaan APBD Melalui E-Government Kepada Masyarakat

Kebijakan komunikasi merupakan rencana strategik dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan komunikasi dipengaruhi perkembangan sosial, politik dan ekonomi sebuah negara. Chakravartty dan Sarikakis (2006,7) dalam Abrar (2008:4) mengungkapkan kebijakan komunikasi memiliki konteks, domain dan paradigma. Konteks berarti keterkaitan kebijakan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya, misalnya politik-ekonomi, politik komunikasi dan lainnya. Domain kebijakan komunikasi bermakna muatan nilai yang dikandung kebijakan komunikasi, seperti globalisasi, ekonomi global dan sejenisnya. Sedangkan paradigma berarti kerangka cita-cita dari kebijakan komunikasi yang dituju, seperti terbentuknya masyarakat informasi, menguatnya civil society dan sebagainya.

Secara keseluruhan muatan konteks, domain dan paradigm kebijakan komunikasi Festival Anggaran seperti yang diungkapkan Bupati Batang 2012-2017 Yoyok sebagai berikut:

“Pemerintah kini semakin berupaya mewujudkan *good governance*, salah satunya melalui transparansi informasi publik yang akurat dan memadai tentang pemerintah kepada publik untuk mencegah KKN. Berkaitan pengelolaan keuangan daerah, sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperlihatkan azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Badan Publik. Festival Anggaran sebagai bentuk

laporan pertanggungjawaban uang rakyat kepada rakyat yang selayaknya bisa menjadi agenda rutin untuk memberantas KKN, penguatan ekonomi daerah dan masyarakat Batang yang sejahtera. Karena rakyat bisa secara langsung bertanya tentang penggunaan anggaran ataupun program pembangunan kepada aparat, memberi masukan ataupun komplain. Dengan cara ini mendorong rakyat untuk ikut peduli dalam proses pembangunan.”

Bertolak dari hasil wawancara di atas, maka konteks FA dikaitkan dengan kebijakan komunikasi yakni politik komunikasi, yang mengandung domain untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparans dan partisipatif. Serta paradigma terwujudnya masyarakat informasi dalam pemerintahan yang bebas KKN seiring reformasi 1998.

Kiprah Yoyok dengan mengadakan FA menurut peneliti sudah tepat. Karena selama ini transparansi keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, hanya menyajikan data-data keuangan secara garis besar dan sifatnya satu arah di media massa. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi rinci dan jelas tentang penggunaan APBD maupun APBN. Diharapkan event tersebut seyogyanya dapat menjadi program rutin tahunan oleh Pemkab Batang untuk semakin mewujudkan *good governance*. Kalaupun data-data keuangan ditampilkan secara *online*, dipastikan tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses informasi tersebut.

Dalam menganalisis kebijakan komunikasi dilakukan dengan dua cara yakni *positive public policy* dan *normative analysis* (Cohcran dan Malone,1992:2) dalam Abrar (2008:12). Pada *positive public policy* menekankan proses kebijakan bekerja, sedangkan pada *normative analysis* (Cohcran,1992:4) lebih tertuju pada penilaian yang seharusnya tertuang dalam kebijakan.

Lasswell dalam Mulyana (2008:69) menyebutkan lima unsur dalam proses komunikasi yaitu sumber (pengirim pesan/komunikator), pesan (dapat berupa makna, bentuk atau simbol), saluran atau media yang

digunakan pemberi pesan, penerima pesan (komunikator) dan efek. Model Laswell mendeskripsikan komunikasi berjalan searah atau linier yang menekankan aspek persuasi yang bertujuan memperoleh efek tertentu.

Komunikasi merupakan alat kekuasaan yang erat kaitannya dengan kepentingan politik. Sumber atau komunikator politik berupaya mencari pengaruh melalui komunikasi (Nimmo, 2005:31). Sebagai komunikator politik, politisi berada di posisi strategis untuk memainkan peran politik dalam suatu *setting* politik tertentu.

Dikaitkan dengan teori Laswell, maka proses kebijakan komunikasi FA secara umum yakni Bupati Yoyok yang didukung sejumlah partai politik, selaku komunikator menyampaikan gagasan/ide untuk membuka akses luas di bidang pengelolaan anggaran secara utuh, terbuka, dialogis dan langsung. Hal ini diwujudkan dalam bentuk FA yang semula melalui selebaran dan rapat-rapat lalu ditingkatkan menjadi dalam bentuk stand secara indoor dan partisi yang melibatkan 4 komponen/bidang.

Pelaksanaan FA berlokasi di lingkungan Pemkab Batang, dengan pesan kebijakan mewujudkan transparansi penggunaan anggaran APBD. Komunikasi meliputi jajaran Pemkab Batang, masyarakat, DPRD, institusi pemerintah dan LSM anti korupsi. Efek yang diharapkan dapat membangun kepercayaan publik, menutup peluang KKN dan menjadi media pembelajaran bagi daerah lain.

### Simpulan

Kegiatan komunikasi juga merupakan kegiatan politik. Komunikasi sebagai hal baku dalam fungsi organisasi yang diimplementasikan secara internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan bersama seraya mengubah perilaku. Festival Anggaran Batang di era Bupati Yoyok yang merupakan bagian dari kebijakan komunikasi terkait penerapan e-Government Plus, proses komunikasinya semula berlangsung satu arah. Tapi meluas dan berkembang menjadi komunikasi transaksi setelah Yoyok membangun koordinasi dan jaringan dengan berbagai pihak

berkompeten, sehingga terjadi pertukaran gagasan, informasi dan pengetahuan. Di era Bupati Wihaji, Festival Anggaran ditiadakan dari bagian penerapan pemerintahan yang berbasis pelayanan elektronik.

### UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

### Daftar Pustaka

- Abrar, Ana Nadhya (2008). *Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat dan Praktek*, Gava Media, Yogyakarta.
- Afdjani, Hadiono (2014). *Ilmu Komunikasi, Proses dan Strategi*. Universitas Budi Luhur dan Indigo Media, Jakarta.
- Arifin, Anwar (2014). *Sistem Komunikasi Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Arrianie, Lely (2010). *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Brent D. Ruben & Lea P. Stewart. *Communication and Human Behavior* (fifth edition), Terjemahan Ibnu Hamad, Rajagrafindo Persada., Jakarta.
- Dunn, William (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, disunting oleh Muhadjir Darwin, Gajah Mada University Press, Jakarta.
- Nimmo, Dan (2005). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Romli, Khomsahrial (2014). *Komunikasi Organisasi Lengkap*, Grasindo, Jakarta.

Tahir, Arifin (2014), Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Alfabeta, Bandung.